



Pemerintah Kota Probolinggo

RENJA

Rencana Kerja
Tahun 2025

**Kecamatan Kanigaran
Kota Probolinggo**

KATA PENGANTAR

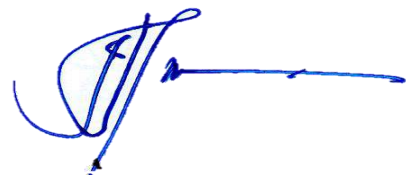
Rencana Kerja Awal Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo 2025-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan selama periode 2025-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Rencana Awal ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2025). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Kanigaran pada akhir tahun anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan potensi wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Probolinggo, 16 Juli 2024

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO



NOOR ALY, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19700103 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum5

1.3 Maksud dan Tujuan7

1.4 Sistematika Penulisan8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan dan Perkiraan
Realisasi Renstra Tahun Berjalan10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....32

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi36

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....47

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....60

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....73

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....73

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....76

3.3 Program dan Kegiatan.....79

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 89

BAB V PENUTUP.....93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 ialah adanya kekosongan jabatan kepala daerah. Masa jabatan Walikota Probolinggo yang terpilih pada periode 2019-2024 berakhir pada tahun 2023. Sehingga dapat dipastikan terdapat kekosongan kepala daerah di Kota Probolinggo pada tahun 2024-2025 hingga kepala daerah dilantik. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah daerah, sehingga daerah yang periode RPJMD-nya telah berakhir dapat merencanakan pembangunan untuk tahun 2025 hingga 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Menghadapi ketidaktersediaan platform politik dalam dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sebagai panduan pembangunan, RPD tersebut mengacu pada Rancangan Awal RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045. Untuk melaksanakan amanat RPD Kota Probolinggo tahun 2025-2026 maka Kecamatan Kanigaran juga membuat Renstra 2025-2026 dan Renja Tahun 2025 Kecamatan Kanigaran yang menjadi landasan operasional untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah serta memberikan arah dan fokus bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) di Kota Probolinggo yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo.

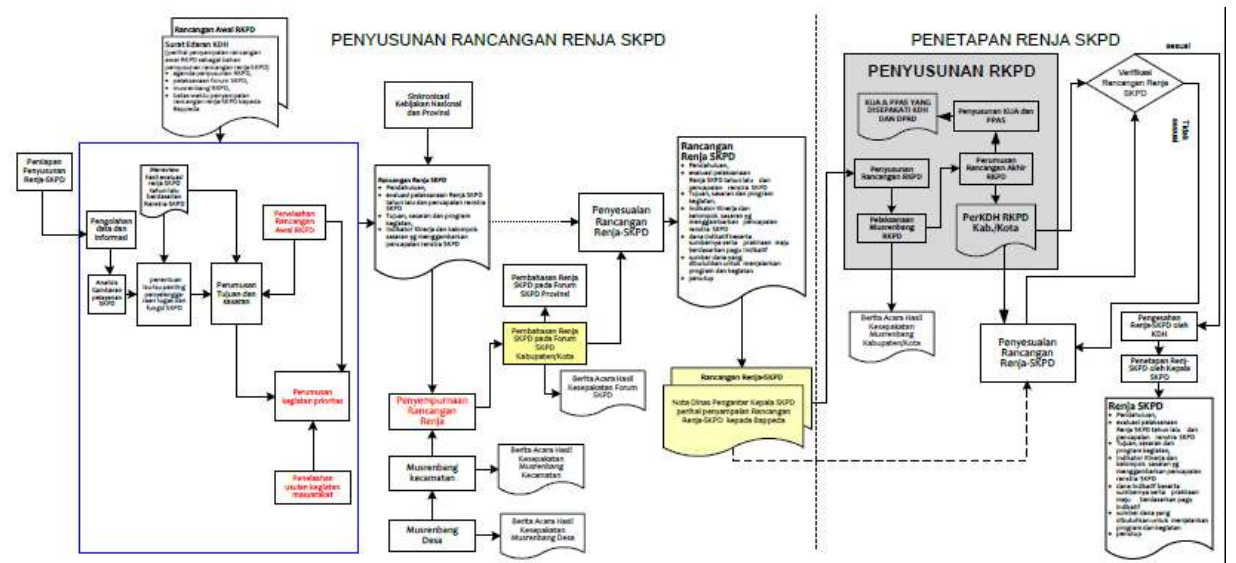
Fungsi dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja PD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai

berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- ☐ Pembentukan Tim Penyusun Renja
- ☐ Orientasi mengenai Renja
- ☐ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- ☐ Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

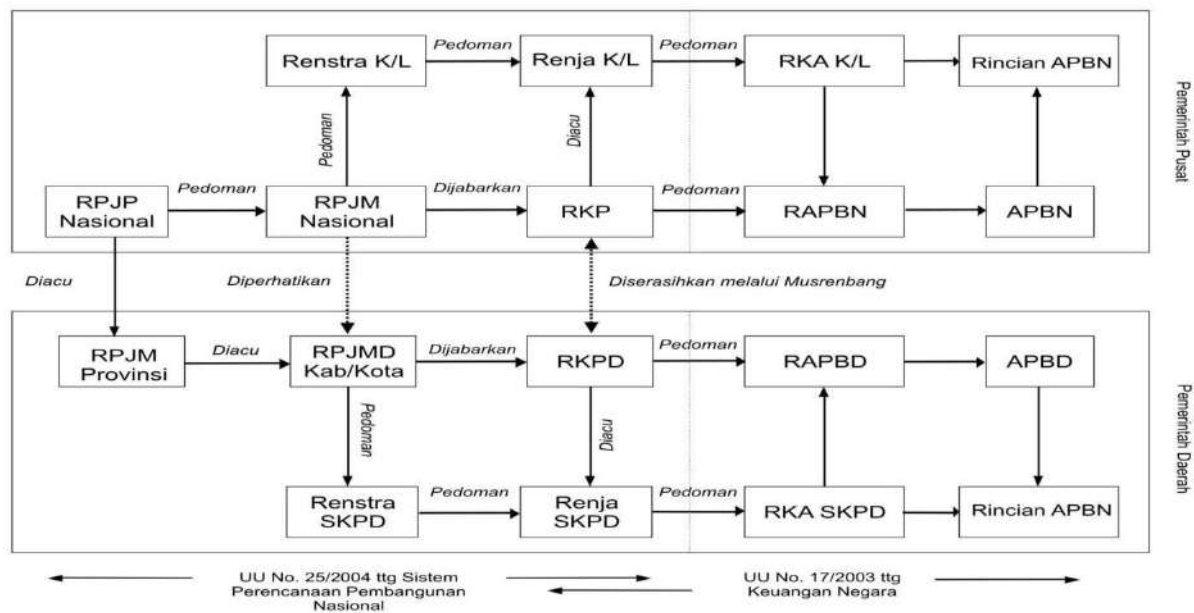
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- ☐ Pengolahan data dan informasi;
- ☐ Analisis gambaran pelayanan PD;
- ☐ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- ☐ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- ☐ Telaah terhadap rancangan awal RPKD
- ☐ Perumusan tujuan dan sasaran;
- ☐ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- ☐ Perumusan kegiatan prioritas;
- ☐ Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- ☐ Penyempurnaan rancangan kerja PD;
- ☐ Pembahasan forum PD; dan

- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

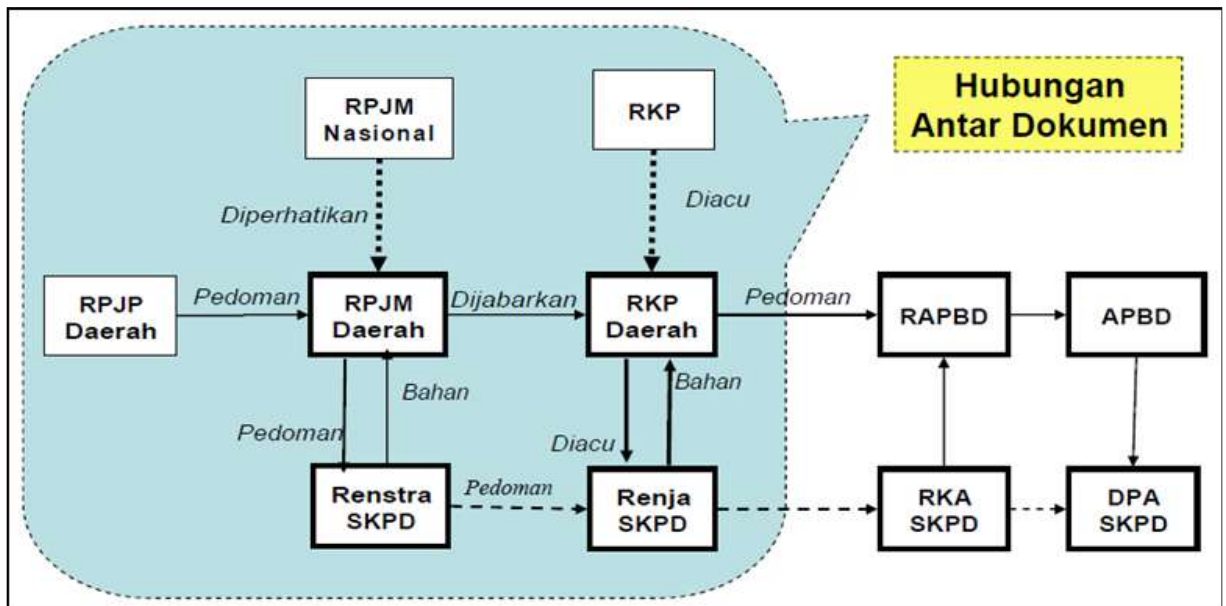
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah :

- 1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) khususnya pasal 7 ayat (1) “RENSTRA – PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
- 2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunanann Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
- 14) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Jawa Timur;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D)
- 17) Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028;
- 18) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

- 19) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
- 20) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
- 21) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 22) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
- 23) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota;
- 24) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 225 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- 26) Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kecamatan Kanigaran yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan

Kanigaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun berselang yaitu tahun 2025.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
2. Meningkatkan tingkat akuntabilitas Kecamatan Kanigaran terhadap pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya
3. Membantu dalam optimalisasi penggunaan sumber daya, sehingga setiap anggaran yang dianggarkan dapat digunakan secara efisien dan efektif
4. Melibatkan partisipasi pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka tercermin dalam rencana kerja tersebut
5. Memberikan dasar untuk pemantauan dan evaluasi, terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disusun dengan tata urutan penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III Tujuan dan Sasaran OPD

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V Penutup

BAB II.
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra
Perangkat Daerah

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2024 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2025 (n), sehingga realisasi capaian target Renja masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra PD (n-2 dan n-3), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari programprogram dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan; Sehingga Perangkat Daerah dapat mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, selain itu juga dapat mengetahui program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Pada dasarnya ide inovatif program/kegiatan yang akan diusulkan pada Rencana Kerja Kecamatan Kanigaran tahun anggaran 2025 ada beberapa yang belum bisa terakomodir karena kendala keterbatasan anggaran, kendati demikian Kecamatan Kanigaran telah mengutamakan program kegiatan yang manfaatnya ditujukan pada pencapaian sasaran :

- 1. Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran
- 3. Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023			
		Pagu		Realisasi	
1.	Belanja Operasi:	Rp.	17.425.971.959,-	Rp.	16.783.336.859,-
	a. Belanja Pegawai	Rp.	8.583.759.719,-	Rp.	8.230.905.952,-
	b. Belanja Barang Jasa	Rp.	8.842.212.240,-	Rp.	8.552.430.907,-
2.	Belanja Modal	Rp.	752.263.000,-	Rp.	399.448.498,-
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	155.050.000,-	Rp.	154.800.000,-
	b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	597.213.000,-	Rp	244.648.498,-
	Jumlah Belanja	Rp	18.178.234.959,-	Rp	17.182.785.357,-

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja /keluaran yang direncanakan adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigaran)

Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 5 unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dipelihara namun hanya direalisasikan sebanyak 1 unit dikarenakan warga yang bersangkutan keberatan tanahnya dihibahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)

Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 4 unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dipelihara namun tidak dapat direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp. 174.504.000,- dikarenakan status tanah merupakan kewenangan DPUPR

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Curahgrinting)

Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 6 unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dipelihara terdapat 5 unit sarana yang tidak dapat direalisasikan dan hanya 1 unit yang direalisasikan, dikarenakan warga tidak berkenan tanahnya dihibahkan sebagai aset Pemerintah Kota Probolinggo

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan:

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Kinerja adalah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target kinerja sebanyak 5 dokumen dan terealisasi 5 dengan anggaran sebesar Rp. 2.259.787.820,- dan terealisasi Rp. 2.222.628.160,-

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan:

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kanigaran)
Target Kinerja adalah 12 Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan capaian kinerja adalah 100%. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 54.686.180,- dan realisasi sebesar Rp. 52.292.160,-
- b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kanigaran)
Target Kinerja adalah 12 Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan capaian kinerja adalah 100%. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 371.519.450,- dan realisasi sebesar Rp. 352.045.455,-
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukoharjo)
Target Kinerja adalah 12 Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan capaian kinerja adalah 100%. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 303.260.090,- dan realisasi sebesar Rp. 290.282.845,-
- d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tisnonegaran)
Target Kinerja adalah 12 Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan capaian kinerja adalah 100%. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 253.610.000,- dan realisasi sebesar Rp. 229.580.691,-
- e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kebonsari Kulon)
Target Kinerja adalah 12 Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan capaian kinerja adalah 100%. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 340.051.180,- dan realisasi sebesar Rp. 331.942.690,-

- f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kebonsari Wetan)
Target Kinerja adalah 12 Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan capaian kinerja adalah 100%. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 323.690.770,- dan realisasi sebesar Rp. 310.470.242,-
- g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Curahgrinting)
Target Kinerja adalah 12 Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan capaian kinerja adalah 100%. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 302.189.180,- dan realisasi sebesar Rp. 285.900.960

2. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan realisasi indikator Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional adalah sebanyak 124 orang, capaian anggaran sebesar Rp.424.178.770,- dan terealisasi Rp. 418.758.240,-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan capaian kinerja Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi sebanyak 10 kelompok dan terealisasi 10 kelompok dengan anggaran 2.079.302.180,- dan terealisasi 2.035.776.980,-

Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo) Capaian Kinerja sebanyak 2 kelompok dari target kinerja 2 kelompok

dengan anggaran sebesar Rp. 224.499.900 dan realisasi sebesar Rp. 176.775.300,-

- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)
Capaian Kinerja sebanyak 3 kelompok dari target kinerja 3 kelompok dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 224.284.000,-
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)
Capaian Kinerja sebanyak 2 kelompok dari target kinerja 2 kelompok dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 216.261.400,-
- d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Curahgrinting)
Capaian Kinerja sebanyak 3 kelompok dari target kinerja 3 kelompok dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 213.048.995,-
- e. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran) Capaian Kinerja sebanyak 2 kelompok dari target kinerja 2 kelompok dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 215.549.600,-
- f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)
Capaian Kinerja sebanyak 2 kelompok dari target kinerja 2 kelompok dengan anggaran sebesar Rp. 150.496.000 dan realisasi sebesar Rp. 144.232.000,-
- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukoharjo)
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dipelihara dan dengan pagu Rp. 100.000.000,- dapat direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp. 65.773.000,- , realisasi anggaran relatif kecil sebab luas tanah yang akan dikerjakan tidak sama dengan usulan
- h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Kulon)
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 3 unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dipelihara dapat direalisasikan 2 unit dengan pagu Rp. 100.000.000,- dengan realisasi 71.067.700,-
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Wetan)
Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1 unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dipelihara dan dapat direalisasikan 1 unit, dengan pagu Rp. 100.000.000 dan

realisasi Rp. 61.632.948,- realisasi anggaran relatif kecil sebab luas tanah yang akan dikerjakan tidak sama dengan usulan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja adalah sebanyak 5 dokumen dari target 5 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi Rp. 15.000.000,-

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian Kinerja adalah jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu sebanyak 70 orang Adapun alokasi anggaran adalah Rp. 8.356.872.719,- dan realisasi Rp. 8.013.642.952,-

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja adalah 12 laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah dan terealisasi 100%. Adapun pagu alokasi adalah Rp. 380.128.350,- dan terserap Rp. 358.654.540,-

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kinerja dapat terealisasi 100% yaitu berupa 4 laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan pagu Rp.2.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.000.000,-

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Capaian Kinerja sebanyak 70 orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan dengan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.685.000,- dan realisasi Rp. 1.685.000,-

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan terealisasi semua sebanyak 7 paket. Adapun pagu sub kegiatan adalah Rp. 108.751.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.477.085,

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja adalah Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket, Adapun Pagu sub kegiatan adalah Rp. 38.529.000 dan terealisasi Rp. 38.411.500,-

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja adalah Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dengan target 24 dokumen dan terealisasi 24 dokumen. Adapun pagu sub kegiatan adalah Rp.3.500.000,-dan terealisasi Rp. 3.500.000,-

d. Fasilitas Kunjungan Tamu

Capaian Kinerja adalah 12 laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Adapun Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi Rp. 4.846.000,-

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Dengan capaian kinerja 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Adapun Pagu sub kegiatan adalah sebesar Rp. 70.000.000 dan terealisasi Rp. 69.873.675,-

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Kinerja adalah Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan capaian 2 unit dan terealisasi 2 unit. Adapun pagu sub kegiatan adalah sebesar Rp. 82.550.000,- dan realisasi sebesar Rp. 82.550.000,-

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja adalah 12 laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi Adapun pagu sub kegiatan adalah sebesar Rp. 166.080.000,- dan realisasi sebesar Rp. 156.858.809,-

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian Kinerja adalah 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan. Adapun pagu sub kegiatan adalah sebesar Rp. 126.871.780,- dan realisasi sebesar Rp. 123.639.500,-

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Capaian Kinerja adalah 1 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Adapun pagu sebesar Rp. 11.000.000,- dan terealisasi 10.710.300,-
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Capaian Kinerja adalah 29 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Adapun pagu adalah sebesar Rp. 23/760.500,- dan terealisasi Rp. 19.749.800,-
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian Kinerja adalah 52 unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Adapun pagu sebesar Rp. 20.000.000,- dan realisasi Rp. 19.749.800,-
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja 1 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Adapun pagu sebesar Rp. 74.258.000,- dan realisasi Rp. 74.258.000,-

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Capaian kinerja program/kegiatan tidak ada yang melebihi target. Semua program/kegiatan terealisasi sesuai dengan target yang ada.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan yang telah direncanakan antara lain:
 - Usulan Masyarakat, perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan sinkronisasi secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian
 - Terdapat perubahan dinamika sosial di masyarakat sehingga mengakibatkan ketidaksamaan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - Status Tanah yang akan dibangun menggunakan Dana Kelurahan masih memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk ditetapkan menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo
 - Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kejadian gangguan keamanan dan ketertiban
 - kurangnya koordinasi dengan 3 Pilar dalam rangka mencegah kejadian gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat
- b. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Kanigaran dapat tercapai sesuai target yang direncanakan, dikarenakan target yang telah ditetapkan pada awal tahun telah diperhitungkan untuk dapat direalisasikan, selain itu kegiatan-kegiatan yang telah tercapai realisasi kinerjanya adalah kegiatan yang bersifat rutinitas sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
- c. Pelaksanaan program/kegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja hal ini disebabkan target program/kegiatan terealisasi telah diukur untuk dapat dilaksanakan sesuai target.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah

Dikarenakan terdapat beberapa sub kegiatan hingga awal Tahun 2024 tidak didukung oleh pemenuhan anggaran yang memadai serta terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Sebagaimana dimutakhirkan dengan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan disesuaikan kembali sesuai Peraturan, yang menyebabkan indikator kinerja akan mengalami perubahan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan di tahun selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target indikator program/kegiatan, maka diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Perubahan parameter penilaian Prioritas kegiatan
- Efisiensi alokasi belanja
- Penambahan alokasi anggaran pada sub kegiatan prioritas
- Merencanakan dan menata kamus musrenbang dengan baik agar usulan dari masyarakat dapat diakomodir sesuai prioritas dan anggaran yang cukup,
- Melakukan koordinasi dan Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo (melalui Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo) serta Reviu ke Inspektorat Kota Probolinggo
- Koordinasi lebih intens dengan 3 Pilar agar kejadian gangguan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kanigaran menurun
- Melakukan Verifikasi dan cek lapangan kesesuaian usulan Musrenbang/Pokir sebelum dimasukkan pada Renja di SIPD.

Adapun secara rinci Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024

sebagaimana Tabel T-C.29 berikut ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024
Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kanigaran

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022 s.d 2024)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2022 s.d 2024)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (9)	11=(kolom 10/9 x 100)
2022-2024														
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar-Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat Yang Aktif	88	88	90	90	100	99	99	100
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi (2023-2024)			90	90	100	95	95	100

						Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan (2022)	94	94					0	-
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (2023-2024)			10	10	100	10	10	100
						Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi (2022)	10	10					0	-!
7	01	03	2.02	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (2023-2024)	Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan(2023-2024)			100	100	100	100	100	100
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (2022)	Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan (2022)	100	100						-
7	01	03	2.02	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Kanigaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (2023-2024)			2	1	50	5	5	100
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi (2022)	4	0						-
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Sukoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (2023-2024)			2	1	50	2	2	100
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi (2022)	2	0						-
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Tisnonegaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (2023-2024)			2	0	0	2	2	100

						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi (2022)	4	0						#DIV/0!
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Kebonsari Kulon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (2023-2024)			3	2	66,66667	3	3	100
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi (2022)	3	0						-
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Kebonsari Wetan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (2023-2024)			3	1	33,33333	3	3	100
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi (2022)	3	0					0	-
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Curahgrinting)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (2023-2024)			3	1	33,33333	3	3	100
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi (2022)	2	0					0	-
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (2023-2024)			2	2	100	2	2	100
						Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (2022)	4	2					0	-

					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (2023)			2	2	100	2	2	100
						Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (2022)	2	2						-
					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (2023-2024)			2	2	100	2	2	100
						Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (2022)	2	2						-
					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (2023)			3	3	100	3	3	100
						Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (2022)	3	3						-
					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (2023-2024)			2	2	100	2	2	100
						Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (2022)	2	2		3				-

					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Curahgrinting	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (2023-2024)			3	3	100	3	3	108
						Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan (2022)	3	3						-
7	01	02	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM (2022-2024)	83.5	82.75	84	82,5	98,21	84,5	84,5	100
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan Kategori Berkembang (2022-2024)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (2022)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (2022-2024)	5	5	5	5	100	5	5	100
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan (2022-2024)			90	90	100	90	90	100
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2022-2024)			12	12	100	90	90	100

					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kangaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2022-2024)			12	12	100	12	12	100
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2022-2024)			12	12	100	12	12	100
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2022-2024)			12	12	100	12	12	100
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Keboonsari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2022-2024)			12	12	100	12	12	100
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2022-2024)			12	12	100	12	12	100

					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kelurahan Curahgrintng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (2022-2024)			12	12	100	12	12	100
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	27	27	30	30	100	30	30	100
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang Difasilitasi	85	85	88	88	100	88	88	100
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2024)						124	124	100
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (2022-2023)			124	124	100			-
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	98,04	98.04	100	100	100	100	100	100

7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			7	7	100	7	7	100
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan (2022)	7	7					0	-
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (2023-2024)			10	10	100	10	10	100
						Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan (2022)	10	10					0	-
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	93,5	93,5	95	95	100	96	96	100
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (2023-2024)			73	70	95,89	70	70	100
						Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu (2022)	100	100						-
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (2023-2024)			12	12	100	12	12	100

						Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi (2022)	100	100					0	-
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan			100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (2022-2023)			73	70	95,89041	-	-	-
7	01	01	2,05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Realisasi Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan (2022)	120	120	-	-	-		0	-
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	-	-	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada (2023-2024)	-	-	4	4	100	4	4	100
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (2023-2024)			7	7	100	7	7	100
						Persentase realisasi peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (2022)	100	100						-

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (2023-2024)			2	2	100	2	2	100
						Persentase realisasi barang cetak dan penggandaan yang diadakan(2022)	100	100					0	-
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2023-2024)			24	24	100	24	24	100
						Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan (2022)	10	10					0	-
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (2023-2024)			12	12	100	12	12	100
						Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi (2022)	100	100					0	-
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2023-2024)			12	12	100	12	12	100
						Persentase rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi (2022)	100	100					0	-
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (2023-2024)			8	8	100	3	3	100

						Jumlah realisasi peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (2022)	2	2					0	-
7	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	2	2	-	-	-	-
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (2023-2024)			12	12	100	12	12	100
						Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (2022)	100	100					0	-
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2023-2024)			12	12	100	12	12	100
						Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi (2022)	100	100					0	-
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (2023-2024)			100	100	100	100	100	100
						Persentase BMD yang Terpenuhi (2022)	100	100					0	-

7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (2023-2024)			1	1	100	1	1	100
						Persentase Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam kondisi layak (2022)	100	100						-
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (2023-2024)			27	27	100	29	29	100
						Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak (2022)	100	100						-
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (2023-2024)			52	52	100	60	60	100
						Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik (2022)	100	100						-
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2023-2024)			1	1	100	1	1	100
						Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (2022)	100	100						-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Kanigaran sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun sasaran yang diampu oleh Kecamatan Kanigaran dalam rangka pencapaian IKU pada Tahun 2023 antara lain:

a. Sasaran 1: **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan** dengan Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat* yang dicapai melalui :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target indikator program : Indeks Kepuasan Masyarakat 83,5 (Realisasi Kinerja 82,75) terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 Sub Kegiatan.
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan, terdiri dari 7 Sub Kegiatan.

Pada triwulan IV Tahun 2023 Capaian Kinerja yang terealisasi sebesar 0% hal ini dikarenakan pengukuran capaian kinerja pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menggunakan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sedangkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada triwulan ke IV. Selain itu kurangnya sarpras berupa monitor Survey Layanan masyarakat melalui aplikasi Portal Emas masih belum dapat direalisasikan hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Sedangkan Pagu Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 4.173.425.839,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.075.143.203,-.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Presentase Penurunan Gangguan Keamanan dengan target 25% pada tahun 2023, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan

Capaian Kinerja terealisasi sebesar 25% dari target 25% hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan yang bersifat rutin telah terlaksana seperti pengamanan terpadu di wilayah Kelurahan se Kecamatan Kanigaran serta adanya peningkatan Koordinasi 3 Pilar yang diharapkan mampu mencegah kenaikan potensi gangguan keamanan. Pagu Anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah sebesar Rp. 424.178.770,- dengan realisasi sebesar Rp. 418.758.240,- (98,72%).

b. Sasaran 2: **Meningkatkan Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan** dengan Indikator “Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi” (Realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebesar 40%) yang dicapai melalui:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Indikator Presentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif dengan target 90% pada tahun 2023 terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, terdiri dari 12 Sub Kegiatan
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 Sub Kegiatan

Capaian kinerja pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 77,16%, hal ini dikarenakan masih banyak kegiatan dana kelurahan yang belum dapat direalisasikan seluruhnya serta terdapat hambatan berupa kesepakatan dengan Pokmas maupun kebijakan teknis tentang peraturan perundangan. Sedangkan Pagu Program adalah sebesar Rp. 4.029.302.180,- dengan realisasi Rp.

3.525.801.873,- (87,5%). Realisasi anggaran tergolong sangat rendah hal ini dikarenakan kegiatan Dana Kelurahan masih belum direalisasikan sepenuhnya oleh Kelurahan.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Dengan inidikator Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yagn ditangani sesuai ketentuan yang terdiri dari 1 program

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% pada Tahun 2023, terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub Kegiatan
- 5) Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari 2 sub kegiatan
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terdiri Dari 4 Sub Kegiatan

Pagu anggaran program adalah sebesar Rp. 9.551.328.170,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.163.082.041,- (95,64%) . Realisasi anggaran juga telah disesuaikan dengan Dokumen Anggaran Kas.

Adapun pencapaian indikator kinerja Pelayanan Kecamatan Kanigaran terdapat pada Table TC.30:

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kanigaran
Pemerintah Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD					Realisasi					Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi			25%	30%	35%	40%	45%	25%	65,38%	85,71%	86,35%	87%	90%	91%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			82,5 skor	83 skor	83,5 skor	84 skor	84,5 skor	81,96 skor	76,78 skor	82,75 skor	82,75 skor	84,5 skor	84,25 skor	85 skor	
3	Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			250 skor	255 skor	0	0	0	306,05	309,67	-	-	-	-	-	
4	Meningkatnya Manajemen Perkantoran			-	-	-	98	98	-	-	-	98	98	100	100	

Dikarenakan pada Tahun 2023 realisasi untuk IKU Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi telah melampaui target, maka target IKU tersebut telah diganti pada Renstra tahun 2025-2026 menjadi 90% pada Tahun 2025 dan 91% pada Tahun 2026. Realisasi target tersebut melampaui target dikarenakan semua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta Pokmas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah berperan secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kanigaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, dan mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah sebagai proses interaksi pemerintah, institusi daerah lainnya serta masyarakat sebagai pilar pembangunan, adapun isu -isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah antara lain:

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kanigaran merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Tahun 2022 di Wilayah Kecamatan didukung dengan:

1. Camat 1 orang
2. Sekretaris Kecamatan 1 orang
3. Kasubbag di Sekretariat 2 orang
4. Kepala Seksi 4 orang
5. Lurah 6 orang
6. Sekretaris Lurah 6 orang
7. Kepala Seksi di Kelurahan 18 orang
8. Staf

Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan Perangkat Daerah, demikian juga dengan di Kecamatan, masyarakat menilai kinerja Kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Adapun permasalahan dan Hambatan Kecamatan Kanigaran secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik kepada masyarakat masih belum optimal

2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan yang berbasis digital sehingga pelaksanaan Pelayanan berbasis Android masih realtif dilaksanakan secara manual.
3. Kurangnya pemahaman LPM dalam mensinkronkan antara usulan dari masyarakat dengan peraturan perundangan yang ada.
4. Kurangnya Koordinasi antara LPM dengan Kelurahan dan Kecamatan, sehingga volume usulan masyarakat terlalu banyak yang mengakibatkan banyak usulan yang tidak dapat terakomodir dalam Renja 2022
5. Masih perlu adanya sinkronisasi Peraturan Perundangan tentang dana kelurahan yaitu Perwali 173 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan sehingga kegiatan Dana Kelurahan dapat terealisasi secara optimal

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's

Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

2.3.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Kanigaran dalam meningkatkan Pelayanan

Untuk menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Kanigaran menggunakan analisis SWOT, yang merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut

Analisis Faktor Internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

1. Kekuatan (S) Kecamatan Kanigaran

- 1) Adanya tujuan dan sasaran yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh kecamatan
- 2). Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.
- 3) Adanya Kode Etik Pegawai dan sistem pelaporan kinerja yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.
- 4) Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
- 5) Adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas.

2. Kelemahan (W) Kecamatan Kanigaran

- 1) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima (Kualitas dan Kuantitas SDM) sesuai spesifikasi tertentu.
- 2) Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- 3) Belum optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).
- 4) Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat
- 5) Kurangnya pemahaman pokmas dan kelurahan dalam Penatausahaan Keuangan di Kelurahan sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan

Sedangkan Analisis Faktor Eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi peluang (Opportunity) dan tantangan-tantangan (Threatness) antara lain:

3. Peluang (O) Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Dukungan Paket Data yang diberikan pada RT /RW dalam mendukung pelayanan berbasis online Portal Emas.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dana kelurahan

3. Adanya kerja sama yang baik serta dukungan dari instansi terkait seperti Puskemas, Dukcapil, Dinsos, DKUPP, serta Koramil dan Polsek
4. Dukungan internet yang baik, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah
5. Adanya Inovasi Podcast Ngopi Pintar yang merupakan terobosan dalam menjembatani kebijakan oleh Kecamatan untuk Masyarakat


4. Tantangan/Hambatan (T) Pengembangan Pelayanan

Tantangan merupakan kecenderungan yang tidak menguntungkan yang dihadapi Kecamatan Kanigaran dalam pengembangan pelayanan masyarakat secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan paradigma baru tentang perencanaan anggaran yang harus responsif gender, dimana terdapat keterlibatan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas dalam program/kegiatan yang direncanakan
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan di kecamatan sehingga banyak kebijakan yang diambil seolah –olah tidak berdampak langsung kepada masyarakat
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan Publik kepada masyarakat sehingga pelayanan kependudukan tidak dapat dimonitor secara berkala setiap bulannya dan hanya dapat dihitung secara manual pada akhir tahun.
4. Banyak usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat diakomodir dalam Renja Kecamatan disebabkan keterbatasan anggaran
5. Kurangnya kelayakan Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tugas yang ada dimana latar belakang pendidikan dan kemampuan berdampak pada proses pekerjaan pemerintahan di Kecamatan maupun Kelurahan.

Dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan tantangan), dituangkan ke dalam SWOT Matric sebagai berikut :

Tabel SWOT MATRIC

	STRENGTHH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
	<div>1) Adanya tujuan dan sasaran yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh kecamatan</div> <div>2) Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.</div> <div>3) Adanya Kode Etik Pegawai dan sistem pelaporan kinerja yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.</div> <div>4) Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.</div> <div>5) Adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas</div>	<div>1) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima (Kualitas dan Kuantitas SDM)sesuai spesifikasi tertentu.</div> <div>2) Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</div> <div>3) Belum optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).</div> <div>4) Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat</div> <div>5)Kurang nya pemahaman pokmas dana kelurahan dalam Penatausahaan Kegiatan di Kelurahan sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan</div>
OPPORTUNITY (PELUANG)	S-O	W-O
<div>1)Dukungan Paket Data yang diberikan pada RT /RW dalam mendukung pelayanan berbasis online Portal Emas</div> <div>2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dana kelurahan</div> <div>3)Adanya kerja sama yang baik serta dukungan dari instansi terkait seperti Puskemas, Dukcapil, Dinsos, DKUPP, serta Koramil dan Polsek</div> <div>4)Berkembangnya teknologi informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah</div>	<div>a.Implementasikan tujuan dan sasaran yang ada</div> <div>b.Optimalkan sarana dan prasaran yang ada</div> <div>c.Berdayakan kode Etik yang ada</div> <div>d.Implementasikan SOP yang ada</div> <div>e. implementasikan dengan optimal paket data kepada masyarakat</div>	<div>a.lakukan peningkatan kapasitas SDM</div> <div>b. Buat database pemberdayaan masyarakat yang memadai</div> <div>c.ajukan Usulan Perubahan Kebijakan Teknis pada instansi terkait</div> <div>d. optimalkan Koordinasi yang telah ada</div> <div>e. optimalkan anggaran yang ada</div>

	STRENGTHH (KEKUATAN)	WEAKNESS (KELEMAHAN)
5)Adanya Inovasi Podcast Ngopi Pintar yang merupakan terobosan dalam menjembatani kebijakan olehnKecamatan untuk Masyarakat		
THREAT (HAMBATAN)	S-T	W-T
<p>1.Adanya perubahan paradigma baru tentang perencanaan anggaran yang harus responsif gender, dimana terdapat keterlibatan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas dalam program/kegiatan yang ada.</p> <p>2.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan di kecamatan sehingga banyak kebijakan yang diambil seolah –olah tidak berdampak langsung kepada masyarakat</p> <p>3.Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan Publik kepada masyarakat sehingga pelayanan kependudukan tidak dapat dimonitor secara berkala setiap bulannya dan hanya dapat dihitung secara manual pada akhir tahun</p> <p>4.Banyak usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat diakomodir dalam Renja Kecamatan disebabkan keterbatasan anggaran</p> <p>5.Kurangnya kelayakan Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tugas yang ada dimana latar belakang pendidikan dan kemampuan berdampak pada proses pekerjaan pemerintahan di Kecamatan maupun Kelurahan</p>	<p>Optimalkan sarana dan prasarana yang ada</p> <p>Lakukan pendampingan terhadap SDM pendukung pelayanan di kelurahan berdasarkan tupoksi dan kode etik yang ada</p> <p>Pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang responsive gender</p>	<p>Optimalkan jumlah personil yang ada</p> <p>Berdayakan pegawai yang memiliki keahlian tertentu</p> <p>Mengoptimalkan anggaran yang ada</p>

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1 = tidak penting, 5 = sangat penting). Sedangkan nilai Bobot Faktor berdasarkan kontribusi atau pengaruh, semakin besar kontribusinya maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap pencapaian visi dan misi dengan jumlah total nilai 100

Urgensi Faktor terhadap Misi :

NU : Nilai Urgensi

BF : Bobot Faktor

Analisa kuantitatif SWOT – Strengths (Kekuatan)

No	Stength (Kekuatan)	NU	BF	NUxBF
1	Adanya tujuan dan sasaran yang jelas sebagai arah yang ingin dicapai oleh kecamatan	5	30	150
2	Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.	4	20	80
3	Adanya Kode Etik Pegawai dan sistem pelaporan kinerja yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.	4	15	60
4	Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.	5	20	120
5	Adanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas	5	15	75
	Jumlah		100	485

Analisa kuantitatif SWOT – Weakness (Kelemahan)

No	Weakness (Kelemahan)	NU	BF	NUxBF
1	Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan	2	15	30

No	Weakness (Kelemahan)	NU	BF	NUxBF
	prima (Kualitas dan Kuantitas SDM)sesuai spesifikasi tertentu			
2	Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	2	15	30
3	Belum optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).	2	15	30
4	Kurang Optimalnya Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat	2	30	60
5	Kurangnya pemahaman pokmas dan kelurahan dalam Penatausahaan Kegiatan di Kelurahan sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan	2	25	50
	jumlah		100	200

Analisa kuantitatif SWOT – Opportunity (peluang)

No	Opportunity (peluang)	NU	BF	NUxBF
1	Dukungan Paket Data yang diberikan pada RT /RW dalam mendukung pelayanan berbasis online Portal Emas.	4	20	80
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dana kelurahan	3	20	60
3	Adanya kerja sama yang baik serta dukungan dari instansi terkait seperti Puskemas, Dukcapil, Dinsos, DKUPP, serta Koramil dan Polsek	4	15	60

No	Opportunity (peluang)	NU	BF	NUxBF
4	Berkembangnya teknologi informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah	5	25	125
5	Adanya Inovasi Podcast Ngopi Pintar yang merupakan terobosan dalam menjembatani kebijakan olehnKecamatan untuk Masyarakat	4	20	80
	jumlah		100	405

Analisa kuantitatif SWOT – Threat (Hambatan)

No	Threat (Hambatan)	NU	BF	NUxBF
1	Adanya perubahan paradigma baru tentang perencanaan anggaran yang harus responsif gender, dimana terdapat keterlibatan laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas dalam program/kegiatan yang ada.	4	20	80
2	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan di kecamatan sehingga banyak kebijakan yang diambil seolah –olah tidak berdampak langsung kepada masyarakat	4	15	60
3	Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan Publik kepada masyarakat sehingga pelayanan kependudukan tidak dapat dimonitor secara berkala setiap bulannya dan hanya dapat dihitung secara manual pada akhir tahun.	2	15	30
4	Banyak usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat diakomodir dalam Renja Kecamatan disebabkan keterbatasan anggaran	2	25	50

No	Threat (Hambatan)	NU	BF	NUxBF
5	Kurangnya kelayakan Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan tugas yang ada dimana latar belakang pendidikan dan kemampuan berdampak pada proses pekerjaan pemerintahan di Kecamatan maupun Kelurahan.	2	25	50
	jumlah		100	290

Adapun hasil dari analisa tersebut

No	Uraian	Formula	Hasil	Jumlah
1	Strategi SO	Hasil tabel S+O	485 + 405	890
2	Strategi WO	Hasil tabel W+O	200+405	605
3	Strategi ST	Hasil tabel S+T	485+290	775
4	Strategi WT	Hasil tabel W+T	200 + 290	490

Dari penilaian tersebut dapat dilihat bahwa Strategi SO merupakan faktor yang dominan dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Kanigaran dengan nilai 890 yang berarti menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Faktor lain yang mendukung yaitu Strategi ST dengan nilai 775, yang berarti Kecamatan Kanigaran harus dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari atau mengatasi hambatan/ancaman. Dasar analisa sederhana ini akan dituangkan ke dalam penetapan misi, sasaran dan kebijakan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan model kebijakan oleh Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2025.

2.3.5. Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi kemajuan Kota Probolinggo di masa datang. Analisis isu-isu strategis telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kanigaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi, serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu-isu strategis juga tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan pelayanan, maka isu strategis yang ada di Kecamatan Kanigaran yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Prioritas di tahun 2025 antara lain:

Urusan Kecamatan/Kewilayahan:

1. Peningkatan kualitas, integritas dan profesionalitas aparatur pemerintahan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat;
2. Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Akses Informasi terhadap layanan publik;
3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pelayanan publik berbasis teknologi berbasis Android;
4. Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan fungsi kecamatan
5. Peningkatan system keamanan terpadu di Kecamatan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:

1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam pembangunan
3. Peningkatan akomodasi usulan-usulan masyarakat melalui musrenbang baik itu dari dana kelurahan maupun anggaran perangkat daerah terkait
4. Fasilitasi proses pengalihan status tanah dari pribadi menjadi aset kota probolinggo untuk lokasi-lokasi yang akan di sarana dan prasarana kelurahan.
5. Pengarusutamaan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi disabilitas
6. Peningkatan intensitas kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat misalnya fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM, Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan
7. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan informasi tentang peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2025 berdasarkan RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kanigaran. Renja 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja dan capaiannya.

Melalui dokumen Rencana Kinerja (Renja) akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan dan sub kegiatan. Pada poin ini disampaikan proses yang dilakukan dalam membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Tahun 2025, dimana telah dilakukan pemetaan program/kegiatan yang telah dilakukan di Tahun sebelumnya. Besaran Pagu pada Hasil Analisis Kebutuhan pada Renja awal masih belum dapat dipastikan mengingat besaran anggaran Prioritas pada Tahun 2025 masih belum dapat ditentukan. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel TC.31 berikut:

.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Pemerintah Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kanigaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NON URUSAN										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kanigaran	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	99%	9.540.925.447	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kanigaran	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100 %	10.816.436.837	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</i>	<i>100%</i>	<i>15.000.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</i>	<i>100 %</i>	<i>16.500.000</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	16.500.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	95%	8.158.018.347	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	95%	10.008.082.125	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang	8.138.018.347	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang	9.945.782.189	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	62.299.936	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100%	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	100%	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	3.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	5.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73 orang	3.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73 orang	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	179.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	153.325.640	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	55.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.885.640	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	4.440.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	13.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	75.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	75.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100%	921.288.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	100%	324.399.476,00	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	164.670.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	170.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	756.618.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 153.799.476	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	192.619.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 %	232.129.596	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	26.650.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	29.350.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	70.968.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	79.779.096	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 unit	23.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	

	URUSAN : KEWILAYAHAN					URUSAN : KEWILAYAHAN					
II	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	84 skor	3.045.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	84 skor	2.663.234.520	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	100%	2.000.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	100 %	1.805.693.936	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	2.000.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	1.745.693.936	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kanigaran)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	10.000.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sukoharjo)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	10.000.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Tisnonegaran)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	10.000.000	

						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kebonsari Kulon)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	10.000.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kebonsari Wetan)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	10.000.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Curahgrinting)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dokum en	10.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan		Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	90%	750.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan		Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	90%	664.540.584	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	58.701.936	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kanigaran		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kanigaran		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	146.443.872	

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Sukoharjo		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Sukoharjo		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	81.082.968	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Tisnonegaran		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Tisnonegaran		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	60.000.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Kulon		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Kulon		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	112.251.936	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Wetan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Wetan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	124.976.904	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Curahgrinting		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Curahgrinting		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	12 laporan	81.082.968	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan	89%	295.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan	89%	193.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 laporan	295.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 laporan	193.000.000	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35%	20.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35%	35.482.968	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	81%	20.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi	81%	35.482.968	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	20.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	35.482.968	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	80%	450.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	80%	411.000.000	

	Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	80%	450.000.000	Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	80%	411.000.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	175 orang	425.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	175 orang	-	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 laporan	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 laporan	411.000.000	

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	84%	2.000.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	84%	1.891.417.936	
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>		<i>Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi</i>	95%	790.000.000	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>		<i>Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi</i>	95%	529.417.936	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 kelomp ok	790.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 kelomp ok	529.417.936	
	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>		<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</i>	95%	10.000.000	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>		<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</i>	95%	12.000.000	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70 keluarg a	10.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70 keluarg a	12.000.000	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	85%	1.200.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	90%	1.350.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	185.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	175.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	193.500.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3	130.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2	199.000.000	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Curahgrinting)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Curahgrinting)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	3	223.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigaran)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	50.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigaran)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	40.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukoharjo)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	50.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukoharjo)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	50.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	50.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	31.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Kulon)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	50.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Kulon)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	95.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Wetan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	50.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Wetan)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	26.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Curahgrinting)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	50.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Curahgrinting)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2.000.000	
	JUMLAH				15.055.925.447					15.817.572.261	

2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Kanigaran sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan daerah yaitu Pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Kewilayahan, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas pelayanan kependudukan, administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan, maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi yang nantinya akan diteruskan pada perangkat daerah terkait.

Usulan Masyarakat tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, dimana sebelum usulan tersebut disampaikan masyarakat melalui LPM, Kecamatan Kanigaran telah membuat Kamus Usulan Musrenbang yang tujuannya adalah untuk membuat kerangka usulan yang sesuai dengan kewenangan Kecamatan serta membatasai jenis-jenis usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan, hal ini dilakukan agar usulan masyarakat tersebut dapat diakomodir sesuai pagu anggaran yang ada. Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Masyarakat melalui LPM sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD masih belum dapat terisi disebabkan Musrenbang masih belum dilaksanakan yaitu sebagaimana berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pemerintah Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kanigaran

No.	Program/Kegiatan Tahun 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
	Kelurahan Kanigaran			210.000.000	
a	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	170.000.000	
1	(2025) Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	LINMAS Kelurahan Kanigaran	Pentingnya peningkatan SDM anggota Keamanan / LINMAS yang ada	10.000.000	
2	2025) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan akan pentingngnya perilaku hidup bersih	10.000.000	
3	(2025) Pengembangan Potensi Anak Tingkat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Uapaya meningkatkan sumber daya masyarakat kelurahan kanigaran	30.000.000	
4	(2025) Pelatihan dasar pembuatan produk kreatif bagi Masyarakat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Upaya meningkatkan sumber daya masyarakat kelurahan kanigaran	30.000.000	
5	(2025) Sosialisasi Tanggap darurat bencana (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Upaya meningkatkan sumber daya masyarakat kelurahan kanigaran tentang bencana	10.000.000	
6	(2025) Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Upaya meningkatkan sumber daya masyarakat kelurahan kanigaran	10.000.000	
7	(2025) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Upaya meningkatkan sumber daya masyarakat kelurahan kanigaran	10.000.000	
8	(2025) Pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Uapaya meningkatkan sumber daya masyarakat kelurahan kanigaran	30.000.000	

9	(2025) Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik dan/atau Tabulapot bagi Masyarakat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Warga Kelurahan Kanigaran	Upaya meningkatkan sumber daya masyarakat kelurahan kanigaran	30.000.000	
b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigaran)			40.000.000	
10	(2025) Penyediaan Gerobak Sampah Dorong (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 1-14 Kecuali RW 9 karena baru dapat tahun 2023 , Kota Probolinggo	Penarik sampah sudah ada namun Gerobak sampahnya belum dan saat ini masih pakai Becak	40.000.000	
	Kelurahan Sukoharjo			476.550.000	
c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo)			290.000.000	
11	(2025) Pelatihan dan Pembinaan LKK (Posyandu, PKK, RT, RW, LPM, Karang Taruna, dan LKL) di Kelurahan (DAKEL) Skala Kecil diselenggarakan di dalam Kelurahan di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.04 RW. 02, Kota Probolinggo	Kurang Paham dan mengerti LKK Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat yang Efisien dan Efektif (Pokmas Menara)	40.000.000	
12	(2025) Pelatihan dan Pembinaan LKK (Posyandu, PKK, RT, RW, LPM, Karang Taruna, dan LKL) di Kelurahan (DAKEL) Skala Besar diselenggarakan di luar Kelurahan di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.04 RW. 02 , Kota Probolinggo	Kurang Paham dan mengerti LKK Kelurahan dalam Pelayanan Masyarakat yang Efisien dan Efektif (Pokmas Menara)	25.000.000	
13	(2025) Pengembangan Potensi Anak Tingkat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.04 RW. 02 , Kota Probolinggo	Kurangnya Pemahaman tentang Pengenalan Potensi Anak (Pokmas Menara)	30.000.000	
14	(2025) Pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.05 RW. 02 , Kota Probolinggo	Tidak mengerti Cara Mengolah makanan dengan benar (Pokmas Menara)	30.000.000	
15	(2025) Pelatihan dasar pembuatan produk kreatif bagi Masyarakat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.04 RW. 02 , Kota Probolinggo	Kurang Mengerti Masyarakat dalam Membuat Produk Kreatif (Pokmas Menara)	30.000.000	
16	(2025) Pelatihan dasar pembuatan produk kreatif bagi Masyarakat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.07 RW. 05 , Kota Probolinggo	Kurang Mengerti Masyarakat dalam Membuat Produk Kreatif (Pokmas Bintang Bersinar)	30.000.000	

17	2025) Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik dan/atau Tabulapot bagi Masyarakat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.05 RW. 02 , Kota Probolinggo	Kurang Pahamdan Kurang mengerti masyarakat dalam menanam Pohon Dalam Pot (Pokmas Menara)	30.000.000	
18	(2025) Pagelaran Seni Budaya dan Pariwisata tingkat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Hasan RT.02 RW. 02 , Kota Probolinggo	seni budaya Daerah menurun (Supandi)	75.000.000	
d	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukoharjo)			186.550.000	
19	2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada bukan tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	JALAN KH. Hasan RT. 03 RW. 01 , Kota Probolinggo	Jalan Becek (Misti ariyani)	28.700.000	
20	2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada bukan tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jalan KH. Hasan Gg. Gerilya RT. 03 RW. 04 , Kota Probolinggo	Paving sudah Rusak	71.750.000	
21	2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada bukan tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl.KH.Hasan Genggong,Gg.Kemangi,Rt. 05 RW. 06 , Kota Probolinggo	kondisi jalan aspal jalan berlubang / rusak berat (Natu Siswanto)	86.100.000	
	Kelurahan Tisnonegaran			295.625.000	
e	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)			195.000.000	
22	(2025) Pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	jl AR hakim RT 1 RW 1, Kota Probolinggo	Untuk meningkatkan ekonomi kelompok penerim maanfaat	30.000.000	
23	(2025) Pagelaran Seni Budaya dan Pariwisata tingkat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	POKDARWIS KELURAHAN TISNONEGARAN, Kota Probolinggo	Meningkatkan seni budaya dan pariwisata tingkat Kelurahan dengan melaksanakan festival juanda menari.	75.000.000	
24	(2025) Pelatihan dasar pembuatan produk kreatif bagi Masyarakat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	UNTUK WARGA KELURAHAN TISNONEGARAN RT 02 RW 03, Kota Probolinggo	Pentingnya Pelatihan dasar pembuatan produk kreatif bagi Masyarakat di lingkungan kelurahan Tisnonegaran	30.000.000	

25	(2025) Sosialisasi pengolahan sampah bagi masyarakat kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	WARGA KELURAHAN TISNONEGARAN KHUSUSNYA PENERIMA MANFAAT (KPM) , Kota Probolinggo	Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengolahan sampah.	10.000.000	
26	(2025) Sosialisasi Tanggap darurat bencana (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Untuk semua warga Kelurahan Tisnonegarn , Kota Probolinggo	Untuk mengurangi resiko bencana dikelurahan Tisnonegaran	10.000.000	
27	(2025) Pelatihan dan Pembinaan LKK (Posyandu, PKK, RT, RW, LPM, Karang Taruna, dan LKL) di Kelurahan (DAKEL) Skala Kecil diselenggarakan di luar Kelurahan di Kecamatan Kanigaran	UNTUK LKK YANG ADA DIKELURAHAN TISNONEGARAN , Kota Probolinggo	Pentingnya pelatihan dan pembinaan LKK yang ada dikelurahan Tisnonegaran	40.000.000	
f	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)			100.625.000	
28	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl.Ir Juanda RT 02 / RW 02 , Kota Probolinggo	Paving rusak di jalan perumahan sehingga perlu diganti rt 2 rw 2	28.750.000	
29	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl.Pahlawan RT 3 / RW 3 , Kota Probolinggo	Paving rusak di jalan perumahan sehingga perlu diganti jl pahlawan	71.875.000	
	Kelurahan Kebonsari Wetan			533.750.000	
g	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)			330.500.000	
30	(2025) Pelatihan dan Pembinaan LKK (Posyandu, PKK, RT, RW, LPM, Karang Taruna, dan LKL) di Kelurahan (DAKEL) Skala Kecil diselenggarakan di dalam Kelurahan di Kecamatan Kanigaran	Jl. Sunan Muria 46 RT.05 RW.02, Kota Probolinggo	kurangnya sinergitas antar LKK di lingkungan kelurahan	40.000.000	
31	(2025) Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. Sunan Muria 46 RT.05 RW.02, Kota Probolinggo	kurangnya informasi pembekalan tentang tugas dan kinerja Linmas	10.000.000	
h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)			203.250.000	

32	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. MM IBRAHIM RT 4 RW 2, Kota Probolinggo	Jalan berlumpur saat musim hujan vol. 60 m2	17.250.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. Sunan Muria Gg. Intan RT.06 RW.02, Kota Probolinggo	jalan berlumpur saat musim hujan vol. 160 m2	46.000.000	
	(2025) Pekerjaan Pembangunan Saluran Air Buis Beton U-20 yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH Hasan Bayusari 9 RT.05 RW.04, Kota Probolinggo	sering banjir vol. 200 m	14.000.000	
	(2025) Pekerjaan Pembangunan Saluran Air Buis Beton U-20 yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH Hasan Bayusari 7 RT.01 RW.04, Kota Probolinggo	sering banjir vol. 200 m	14.000.000	
	(2025) Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. MM. Ibrahim RT.05 RW.02, Kota Probolinggo	belum tersedianya APAR di Poskamling	1.000.000	
	(2025) Penyediaan sarana Prasarana Rukun Kematian (Keranda, kereta dorong Jenazah, Peralatan mandi termasuk kain penutup) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. MM. Ibrahim RT.03 RW.02, Kota Probolinggo	kondisi sarana prasarana yang tidak layak	15.000.000	
	(2025) Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH Hasan Bayusari 8 RT.04 RW.04, Kota Probolinggo	belum tersedianya APAR di POSKAMLING	1.000.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	POSYANDU ANGGREK, RW.01, Kota Probolinggo	kondisi sarana dan prasarana yang saat ini ada kurang layak	10.000.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	POSYANDU MELATI, RW.02, Kota Probolinggo	kondisi sarana dan prasarana yang saat ini ada kurang layak	10.000.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	POSYANDU KAMBOJA, RW.02, Kota Probolinggo	kondisi sarana dan prasarana yang saat ini ada kurang layak	10.000.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	POSYANDU BOUGENVILLE, RW.03, Kota Probolinggo	kondisi sarana dan prasarana yang saat ini ada kurang layak	10.000.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	POSYANDU KENANGA, RW.04, Kota Probolinggo	kondisi sarana dan prasarana yang saat ini ada kurang layak	10.000.000	

	(2025) Penyediaan sarana Prasarana Rukun Kematian (Keranda, kereta dorong Jenazah, Peralatan mandi termasuk kain penutup) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Bayusari 9 RT.05 RW.04, Kota Probolinggo	kondisi sarana prasarana Rukem kurang layak	15.000.000	
	(2025) Penyediaan sarana Prasarana Rukun Kematian (Keranda, kereta dorong Jenazah, Peralatan mandi termasuk kain penutup) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Bayusari 6 RT.01 RW.04, Kota Probolinggo	kondisi sarana prasarana Rukem kurang layak	15.000.000	
	(2025) Penyediaan sarana Prasarana Rukun Kematian (Keranda, kereta dorong Jenazah, Peralatan mandi termasuk kain penutup) (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Hasan Bayusari 6 RT.05 RW.03, Kota Probolinggo	kondisi sarana prasarana Rukem kurang layak	15.000.000	
	Kelurahan KebonsariKulon			1.494.224.250	
i	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)			255.000.000	
	(2025) Pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17, Kota Probolinggo	Menambah pengetahuan usaha untuk warga KELOMPOK DIFABEL KELURAHAN dan KELOMPOK PENERIMA MANFAAT (KPM PKH/BPNT)	30.000.000	
	(2025) Pelatihan dasar pembuatan produk kreatif bagi Masyarakat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17 , Kota Probolinggo	Menambah pengetahuan usaha pembuatan produk kreatif untuk warga KELOMPOK DIFABEL KELURAHAN dan KELOMPOK PENERIMA MANFAAT (KPM PKH/BPNT)	30.000.000	
	(2025) Pelatihan dasar olahan makanan dan minuman bagi masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17 , Kota Probolinggo	Menambah pengetahuan usaha untuk KELOMPOK PENERIMA MANFAAT (KPM PKH/BPNT)	30.000.000	
	(2025) Pagelaran Seni Budaya dan Pariwisata tingkat Kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17 , Kota Probolinggo	Menampilkan potensi Sanggar Seni Musik, Tari Tradisional serta Gelar Potensi Produk UMKM se Kelurahan Kebonsari Kulon	75.000.000	

	(2025) Sosialisasi Pencegahan dan Penurunan Stunting (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17 , Kota Probolinggo	Menambah pengetahuan tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting untuk warga RW 01 - 17	10.000.000	
	(2025) Sosialisasi pengolahan sampah bagi masyarakat kelurahan (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17 , Kota Probolinggo	Menambah pengetahuan tentang pengolahan sampah untuk warga RW 17 dalam rangka KAMPUNG PROKLIM	10.000.000	
	(2025) Pelatihan dan Pembinaan LKK (Posyandu, PKK, RT, RW, LPM, Karang Taruna, dan LKL) di Kelurahan (DAKEL) Skala Besar diselenggarakan di luar Kelurahan di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17 , Kota Probolinggo	Menambah pengetahuan dari LKK Kelurahan Kebonsari Kulon	60.000.000	
	(2025) Sosialisasi Tanggap darurat bencana (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 01-17 , Kota Probolinggo	Menambah pengetahuan dari LKK dan masyarakat Kelurahan Kebonsari Kulon	10.000.000	
j	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Kulon)			1.239.224.250	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RT 03 RW 01 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	107.812.500	
	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RT 03 RW 01 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	75.000.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Hamid gg I RT 01 RW 04, Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	71.875.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Hamid gg II RT 03 dan 05 RW 04 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	115.000.000	

	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Hamid RT 04 RW 05 blkg masjid Arrohmah wal Barokah , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	15.000.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Priksan gg Cendrawasih RT 04 RW 17 , Kota Probolinggo	Jalan rusak, becek dan genangan air pada saat musim hujan	28.750.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Priksan gg Leo RT 05 RW 17 , Kota Probolinggo	Jalan rusak, becek dan genangan air pada saat musim hujan	57.500.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Taman Bacaan masyarakat skala lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 16 - Kelurahan Kebonsari Kulon , Kota Probolinggo	Untuk memenuhi Sarana Prasarana dan kebutuhan Taman Bacaan kelurahan (TAMAN BACA BOUGENVILLE)	10.000.000	
	(2025) Wahana Bermain Anak di Taman Lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW 16 - Kelurahan Kebonsari Kulon , Kota Probolinggo	Untuk memenuhi Sarana Prasarana dan kebutuhan Taman Bermain anak di KWT SRIKANDI	15.000.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Taman Bacaan masyarakat skala lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Kelurahan Kebonsari Kulon , Kota Probolinggo	Untuk memenuhi Sarana Prasarana dan kebutuhan Taman Bacaan kelurahan (PERPUSTAKAAN SRIKANDI)	10.000.000	
	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. KH. Abdul Hamid Gg. Pandean (rmh P Heri Agus - P Wandu) RT 02 RW 02 , Kota Probolinggo	Perbaiki saluran dengan menggunakan Tutup Saluran karena rusak dan tidak ada tutupnya	21.000.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Hamid gg Kebon Mendek RT 03 RW 03 (depan soto majar ke utara) , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	11.580.500	
	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Azis gg III RT 01-02 RW 06 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	60.000.000	

	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Azis gg III RT 01-02 RW 06, Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	51.750.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Ahmad Dahlan RT 01 RW 05 (samping makam) , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	6.037.500	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Hamid gg Dam RT 03 RW 05 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	25.875.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Ahmad Dahlan RT 02 RW 05 gang samping rumah pak Misnadi , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	18.975.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg Sukun RT 02 RW 08 , Kota Probolinggo	Jalan rusak, becek dan genangan air pada saat musim hujan	43.125.000	
	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg Istiharoh RT 02 RW 09 , Kota Probolinggo	Saluran drainase rusak	75.000.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg Istiharoh RT 02 RW 09 (depan rumah Pak Hasan) , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	27.600.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto Gg. Siam RT 02 RW 07	Jalan rusak, becek dan genangan air pada saat musim hujan	25.875.000	
	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg I RT 03 RW 11 , Kota Probolinggo	Perbaikan saluran dengan menggunakan Tutup Saluran karena rusak dan tidak ada tutupnya	37.500.000	
	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg II RT 04 RW 11 , Kota Probolinggo	Perbaikan saluran dengan menggunakan Tutup Saluran karena rusak dan tidak ada tutupnya	37.500.000	

	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg I s/d II (sisi barat) RT 03 dan 04 RW 11 samping musholla Alikhlas , Kota Probolinggo	Perbaiki saluran dengan menggunakan Tutup Saluran karena rusak dan tidak ada tutupnya	31.500.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg I RT 03 RW 11 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	53.906.250	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg II RT 04 RW 11 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	53.906.250	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg III RT 05 RW 11 , Kota Probolinggo	Becek dan genangan air pada saat musim hujan	53.906.250	
	(2025) Pekerjaan Pemeliharaan saluran yang melekat di jalan lingkungan pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. Panglima Sudirman Gg.12 RT 02 RW 12, sebelah selatan Hj.Munawaroh kebarat sampai pegadaian , Kota Probolinggo	Endapan lumpur dan sampah serta banjir	56.250.000	
	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl. Pahlawan Gg,.Gangsiran RT 02 RW 15 , Kota Probolinggo	Jalan rusak, becek dan genangan air pada saat musim hujan	34.500.000	
	(2025) Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	RW.02	Untuk kelengkapan posyandu lansia RW.02	7.500.000	
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
II	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
k	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			236.750.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	RT 02 RW 01 , Kota Probolinggo	Lingkungan gelap, perlu penerangan	30.000.000	

	(2025) Pekerjaan pavingisasi (K300) jalan lingkungan akses ke persil rumah, lebar jalan maks. 2m pada tanah aset (DAKEL) di Kecamatan Kanigaran	Jl.Ir Juanda RT 02 / RW 02 , Kota Probolinggo	Paving rusak di jalan perumahan sehingga perlu diganti rt 2 rw 2	28.750.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	JL. KH Ahmad Dahlan GG II RT 004 RW 003 depan bu mentik , Kota Probolinggo	Penerangan jalan kurang terang	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jalan KH. Hasan Gg. Srikandi RT.06 RW. 05 , Kota Probolinggo	jalan Kurang Terang	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jalan KH. Hasan Gg. Pelita RT.06 RW. 05 , Kota Probolinggo	jalan Gelap	30.000.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Wilayah RW 02 , Kota Probolinggo	Penerangan jalan kurang terang	7.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Hamid RT 02 RW 02 selatan patung kecapan , Kota Probolinggo	Penerangan jalan kurang terang	30.000.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Abd Azis gg buntu RT 02 RW 06 (dr Khusnul ke timur) , Kota Probolinggo	Lampu jalan rusak	3.500.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto Gg. Meranggi RT01/RT02 RW 07 , Kota Probolinggo	Lampu jalan rusak	7.000.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Pertigaan Jl Cokroaminoto dan Jl. Abd Azis di RT 003 RW 007, Kota Probolinggo	Lampu jalan rusak	3.500.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto Gg. Sukun RT 01 RW 08 , Kota Probolinggo	Lampu jalan rusak	3.500.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto RT 01, 02, 03 dan RT 04 RW 09 , Kota Probolinggo	Lampu jalan rusak	3.500.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto RT 01, 02, 03 dan RT 04 RW 09 , Kota Probolinggo	Lampu jalan rusak dan gelap	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto Gg Meranggi RT 02 RW 10 , Kota Probolinggo	Jalan gelap	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto Gg Kelinci RT 02 RW 10 , Kota Probolinggo	Jalan gelap	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto Gg Kemiri RT 04 RW 10 , Kota Probolinggo	Jalan gelap	30.000.000	

	(2025) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kanigaran	Jl Priksan gg Semeru RT 05 RW 17 , Kota Probolinggo	Lampu jalan rusak	8.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl KH Ahmad Dahlan Kav Angguran gg 6, 7, 8 dan 9 RT 05 RW 16 , Kota Probolinggo	Jalan gelap	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl Cokroaminoto gg II RT 04 RW 11 , Kota Probolinggo	Perbaikan rumah tidak layak huni rumah AGUS SALIM	21.500.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl. Sunan Bonang Gg. Tangkis 1 RW.01 (bundaran glaser ketimur pinggir sungai) , Kota Probolinggo	Kurangnya Penerangan Jalan dan masih agak gelap	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl. Mastrip Gg. Jeruk Lemon Rt.5 RW.14 , Kota Probolinggo	Belum ada Penerangan Jalan (merupakan Jalan Tembus ke Pemukiman)	30.000.000	
	(2025) Pemeliharaan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl. Serang 1 RT.08 RW.13 , Kota Probolinggo	Lampunya sudah banyak yg rusak/mati	9.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Musolla Al. Arif Jl. Cangkring RT.01 RW.02 , Kota Probolinggo	PJU ini akan di Taruh di Gang depan Musolla karena Penerangan Kurang sehingga gelap	30.000.000	
	(2025) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kanigaran	Bu. Maya Jl. Wahid Hasyim RT.3 RW.01 , Kota Probolinggo	Rumah Sebagian Dindingnya terbuat dari Bambu dan tidak memiliki Kamar Tidur	21.500.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl. Supriyadi Gg. Pesantren 2 RT.05 RW.9 , Kota Probolinggo	Kurangnya Penerangan Jalan dan masih agak gelap	30.000.000	
	(2025) Pembangunan PJU Tenaga Surya di Jalan Lingkungan di Kecamatan Kanigaran	Jl. Sunan Bonang bekas jalan lori RT.05 RW.01 , Kota Probolinggo	Kurangnya Penerangan Jalan dan masih agak gelap	30.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan. Visi Indonesia Emas 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkeanjutan. Segala Upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam RPJPN 2025 – 2045. Indonesia akan menjadi negara tangguh mandiri, dan inklusif di 2045. Pembangunan 20 Tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Sasaran Utama RPJPN 2025 – 2045 diantaranya:

1. Sasaran Visi 1 “Pendapatan per Kapita setara Negara Maju”
Pendapatan per Kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 % dan kontribusi PDB Industri pengolahan 28,0 %
2. Sasaran Visi 2 “Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang”
Tingkat Kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8%, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,377 – 0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5%.
3. Sasaran Visi 3 “Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat”
Penguatan diplomasi Internasional dan Kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia.

4. Sasaran Visi 4 “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73.
5. Sasaran Visi 5 “Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission” Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 %.

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (Delapan) misi Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045, diantaranya :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, blue economy, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menciptakan lingkungan Kelembagaan yang dapat menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan Sumber Daya Alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Meningkatkan Pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar

pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif

Berdasarkan 8 (delapan) agenda pembangunan nasional, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran Tahun Pertama dari periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024. RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kota Probolinggo secara keseluruhan. Adapun tema dan prioritas pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana diamanatkan dalam RPD Untuk Tahun 2025 sebagai penjabaran Tahun Pertama atau periode awal dari pelaksanaan RPD ini, telah ditetapkan Tema Pembangunan “PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PENGUATAN EKONOMI INKLUSIF YANG DIDUKUNG PEMENUHAN INFRASTRUKTUR”

Tujuan & Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 mengacu pada RPD Tahun 2025 – 2026 antara lain:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
3. Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
5. Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital

Adapun pada Renja Kecamatan Kanigaran Tahun 2025 mengampu pada Tujuan RPD “Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis Digital” yang kemudian akan di jabarkan pada sasaran, indikator kinerja utama, program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kanigaran

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kanigaran dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Kota Probolinggo dengan program pembangunan tahunan Kecamatan Kanigaran sebagai ukuran terlaksananya tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Kanigaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja Kecamatan Kanigaran secara keseluruhan.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kanigaran pada dua tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi indikator tujuan dan sasaran RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kecamatan Kanigaran. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Kecamatan Kanigaran yang didasarkan pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 adalah

1. “Mewujudkan Pemerintah Yang Adaptif Serta Pelayanan Publik Prima Berbasis Digital “

dengan Sasaran RPD :

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis Integrasi TIK
- b. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

Kemudian dari Sasaran RPD Kota Probolinggo dibuat menjadi Tujuan Kecamatan Kanigaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif di Kecamatan Kanigaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus untuk menyusun program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat dicapai, Sasaran strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran
2. Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan
3. Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan indikator tujuan dan sasaran yang ada. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tahun 2025 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kanigaran yang efisien dan efektif .

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang meliputi apa yang akan dicapai dan yang akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sebab sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus di tindakan dan alokasi sumber daya dalam suatu kegiatan atau aktivitas.

Adapun tujuan, sasaran kinerja, serta capaian kinerja 2023 dibandingkan target kinerja 2024 dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja 2023 dibandingkan Target Kinerja 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TARGET KINERJA TAHUN 2024
					AWAL
1	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kanigaran		Persentase Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan		
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	86,35%	45%

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Kanigaran		IKM di Kecamatan		
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,75	84,5

Sumber : LKJIP Kecamatan Kanigaran 2023

Dikarenakan Pada Tahun 2023 Indikator Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi telah dapat tercapai melebihi target yang ada maka perlu adanya penyesuaian target indikator dimaksud pada Renstra Kecamatan Kanigaran Tahun 2025-2026. Sedangkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat masih memerlukan peningkatan kinerja agar target yang telah dirumuskan dapat direalisasikan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kanigaran Tahun 2025

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		Target Akhir Renstra (2026)
				Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran		Indeks Pelayanan Publik	3,83	3,84	3,84
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kanigaran	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,25	85	85
		Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	90%	91%	91%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif		Nilai SAKIP	77	78	78
		Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang	100%	100%	100%

			ditangani sesuai ketentuan			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

Sumber : Data Diolah Tahun 2025

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kanigaran Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini:

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Pemerintah Kota Probolinggo

Perangkat Daerah: Kecamatan Kanigaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Kecamatan Kanigaran	99%	9.540.925.447	DTU-DBH		99	9.765.533.881
7	01	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</i>		100%	15.000.000			1	16.500.000
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	15.000.000			7 dokumen	16.500.000
7	01	01	2,02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</i>		96%	8.158.018.347			97%	8.241.398.531
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		73 orang	8.138.018.347			73 orang	8.219.398.531
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	20.000.000			12 dokumen	22.000.000

7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi		100%	2.000.000			100%	2.200.000
7	01	01	2,03	10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 laporan	2.000.000			4 laporan	2.200.000
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	3.000.000			100%	3.300.000
7	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		73 orang	3.000.000			73 orang	3.300.000
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	179.000.000			100%	196.900.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 paket	70.000.000			9 paket	77.000.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	12.000.000			5 paket	13.200.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan		24 dokumen	5.000.000			24 dokumen	5.500.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	12.000.000			12 laporan	13.200.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	80.000.000			12 laporan	88.000.000

7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	70.000.000			100%	77.000.000
7	01	01	207	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 unit	70.000.000			5 unit	77.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi		100%	921.288.000			100%	1.013.619.800
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	164.670.000			12 laporan	181.340.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	756.618.000			12 laporan	832.279.800
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	192.619.100			100%	214.615.550
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	26.650.500			1 unit	29.315.550
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		29 unit	70.968.600			29 unit	80.800.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		52 unit	25.000.000			52unit	27.500.000

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	70.000.000			1 unit	77.000.000
					URUSAN : KEWILAYAHAN								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 skor	3.045.000.000			84,5 skor	3.249.000.000
7	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang</i>		<i>100%</i>	<i>2.000.000.000</i>			<i>100%</i>	<i>2.100.000.000</i>
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5 dokumen	2.000.000.000			5 dokumen	2.100.000.000
7	01	02	2,02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan</i>	<i>Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan</i>		<i>90%</i>	<i>750.000.000</i>			<i>91%</i>	<i>825.000.000</i>
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		12 laporan	150.000.000			12 laporan	165.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kanigaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		12 laporan	100.000.000			12 laporan	110.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Sukoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		12 laporan	100.000.000			12 laporan	110.000.000

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Tisnonegaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		12 laporan	100.000.000			12 laporan	110.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		12 laporan	100.000.000			12 laporan	110.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		12 laporan	100.000.000			12 laporan	110.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Curahgrinting	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan		12 laporan	100.000.000			12 laporan	110.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sesuai ketentuan		90%	295.000.000			91%	324.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10 laporan	295.000.000	Dana Insentif Fiskal		11 laporan	324.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		35%	20.000.000			40%	22.000.000

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Difasilitasi		81%	20.000.000			82%	22.000.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 laporan	20.000.000			12 laporan	22.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan		81%	450.000.000			81%	525.000.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan		81%	450.000.000			80%	525.000.000
7	01	05	2,01	02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		175 orang	425.000.000			175 orang	495.000.000

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 laporan	25.000.000			12 laporan	30.000.000
					URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENINGPersentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif		84%	2.000.000.000			84,5%	2.091.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi		95%	790.000.000			95,5%	880.000.000
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		12 kelompok	790.000.000			12 kelompok	880.000.000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		90%	10.000.000			91%	11.000.000
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek		70 keluarga	10.000.000			75 keluarga	11.000.000

					Berbangsa, dan Bernegara	Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							
7	01	03	2.02	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat		85%	1.200.000.000			85,5%	1.200.000.000
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		2 kelompok	150.000.000	1.DTU-DBH 2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		2 kelompok	150.000.000
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		2 kelompok	150.000.000			2 kelompok	150.000.000
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		2 kelompok	150.000.000			2 kelompok	150.000.000
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		3 kelompok	150.000.000			3 kelompok	150.000.000
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan		2 kelompok	150.000.000			2 kelompok	150.000.000

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program Perangkat Daerah Kecamatan Kanigaran merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Kanigaran kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Rencana Usulan Pagu (Rp)
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.816.436.837
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	16.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.500.000
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.008.082.125
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.945.782.189
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.299.936
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	5.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	153.325.640
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.885.640
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	75.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	324.399.476
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.799.476
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	232.129.596
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.350.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.779.096
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.663.234.520
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1.805.693.936
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.745.693.936
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kanigaran)	10.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Sukoharjo)	10.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Tisnonegaran)	10.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Rencana Usulan Pagu (Rp)
1	2
Kecamatan (Kebonsari Kulon)	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kebonsari Wetan)	10.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Curahgrinting)	10.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan	664.540584
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	58.701.936
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kanigaran	146.443.872
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Sukoharjo	81.082.968
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Tisnonegaran	60.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Kulon	112.251.936
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Kebonsari Wetan	124.976.904
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Kelurahan Curahgrinting	81.082.968
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	193.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	193.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	529.417.936
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	529.417.936
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.000.000
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	12.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.350.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigaran)	185.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukoharjo)	175.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tisnonegaran)	193.500.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Kulon)	130.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kebonsari Wetan)	199.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Curahgrinting)	223.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigaran)	40.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukoharjo)	50.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tisnonegaran)	31.500.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kebonsari Kulon)	95.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (kebonsari Wetan)	26.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Rencana Usulan Pagu (Rp)
1	2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Curahgrinting)	2.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	411.000.000
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>411.000.000</i>
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	411.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.482.968,-
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>35.482.968,-</i>
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.482.968,-
Total	15.817.572.261,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo (2025-2026) serta sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo (2025-2026). Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra), yang diturunkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 atau tahun pertama, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sosialisasi Rencana Strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan perencanaan yang telah disusun. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait, secara relevan dan disiplin dalam artian semua aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu

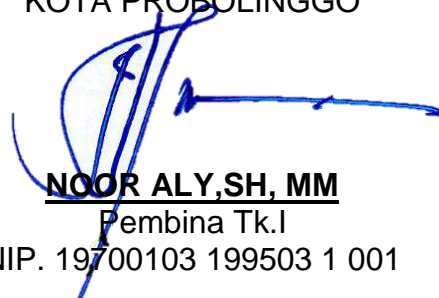
adanya komunikasi dan sosialisasi Renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disusun;
5. Monitoring dan evaluasi atas hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap kinerja dari seluruh personil dan jika perlu dilakukan maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi;
6. Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kanigaran dalam merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan amanat tersebut, hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kegiatan adalah sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai, kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Tahun 2025 ini disusun dan semoga akan menumbuhkan saran dan kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Probolinggo, 16 Juli 2024

CAMAT KANIGARAN
KOTA PROBOLINGGO



NOOR ALY,SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19700103 199503 1 001